

## Implementasi Kebijakan Portal Satu Data Sekadau pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau

Agus Rayadin <sup>1)</sup>; Ida Rochmawati <sup>2)</sup>; Pardi <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Universitas Tanjungpura

Email: <sup>1)</sup>[arayadin@gmail.com](mailto:arayadin@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [10 Oktober 2025]

Revised [28 Januari 2026]

Accepted [30 Januari 2026]

### KEYWORDS

Implementation, One Data Portal, Digitalization .

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, khususnya dalam hal pengelolaan data sektoral yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada empat variabel implementasi kebijakan menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Kominfo, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh dalam pengelolaan data. Selain itu, peran Dinas Kominfo sebagai wali data belum didukung oleh sistem birokrasi dan standar operasional yang memadai. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan SDM yang kompeten, serta perlunya regulasi teknis yang mendukung tata kelola data yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik kebijakan data terbuka dan tata kelola pemerintahan berbasis data di tingkat daerah.

### ABSTRACT

This research examined the process of implementing the Sekadau One Data Portal policy by the Department of Communication and Informatics of Sekadau Regency, and determined the factors that influence it. This research was inspired by the fact that the One Data Indonesia policy has not been implemented optimally at the regional level, especially in the management of accurate, integrated, and accountable sectoral data. The research was descriptive qualitative, and it used four variables of policy implementation according to the theory of Edward III: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicated that the policy implementation continues to encounter a number of challenges, including: small number and quality of human resources, low budget allocation, poor coordination between divisions in the Office of Communication and Informatics, as well as insufficient outreach and training on data management. In addition, the Office of Communication and Informatics as the custodian of the data is not yet backed by a sufficient bureaucratic system and standard operating procedures. The implications of these findings are significant in enhancing institutional capacity, offering qualified human resources, and instituting technical regulations to facilitate more efficient and sustainable data governance. This research is expected to advance the practice of open data policy and data-based governance in the regional level.

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Pemerintah Indonesia menegaskan arah kebijakan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya penyelarasan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Kebijakan ini diharapkan memperkuat prinsip good governance dengan mendorong transparansi dan partisipasi publik berbasis data.

Sebagai implementasinya di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sekadau menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sekadau dan membangun Portal Satu Data Sekadau (<https://data.sekadaukab.go.id/>) untuk menyediakan data sektoral yang terbuka bagi publik. Portal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi dan efisiensi perencanaan pembangunan. Namun, realisasi kebijakan tersebut menunjukkan dinamika yang belum stabil. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau (2025), jumlah dataset yang ditayangkan berfluktuasi: 185 (2021), 439 (2022), turun tajam menjadi 141 (2023), dan kembali naik menjadi 222 (2024). Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengumpulan, kurasi, dan publikasi data lintas perangkat daerah.

Dari sisi kelembagaan, Dinas Kominfo Sekadau berperan ganda sebagai produsen sekaligus wali data. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih dibatasi oleh sumber daya manusia dan anggaran. Dari total 19 ASN yang tersedia, hanya satu berstatus fungsional statistisi, sementara sebagian besar pegawai merangkap tugas lain seperti pranata komputer dan pengelola situs. Keterbatasan kompetensi dan pembagian peran menyebabkan proses validasi serta integrasi data belum optimal. Selain itu, pada tahun 2024, alokasi anggaran pengelolaan statistik sektoral hanya mencapai Rp 111 juta dari kebutuhan Rp 186 juta, memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan dukungan fiskal yang tersedia. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya koordinasi antarbidang di lingkungan Dinas Kominfo, sehingga kontribusi data dari masing-masing bidang tidak merata dan cenderung menurun dalam dua tahun terakhir.

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyoroti rendahnya kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia akibat keterbatasan kapasitas sumber daya, infrastruktur, dan komitmen organisasi (Hasnita & Salomo, 2025). Selain faktor teknis, keberhasilan implementasi open data juga ditentukan oleh budaya kerja kolaboratif dan dukungan kepemimpinan yang konsisten (Bernot, 2024; Adistyarini & Apriono, 2024). Dengan demikian, efektivitas kebijakan Satu Data di tingkat daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada tata kelola institusi dan keselarasan antaraktor pelaksana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi implementasi kebijakan publik dan menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat tata kelola data daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

Kebijakan publik merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam memecahkan masalah masyarakat. Agustino (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan kolektif yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama. Subarsono (2022) menegaskan bahwa kebijakan publik bukan hanya produk hukum, melainkan tindakan yang mengandung maksud, sasaran, serta pelaksanaannya di lapangan. Dalam pandangan Nugroho (2012), kebijakan publik adalah wujud intervensi negara dalam mengatur kegiatan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum. Dengan demikian, kebijakan publik tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi menuntut keberhasilan implementasi di lingkungan birokrasi sebagai indikator utama efektivitasnya. Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap penting karena pada fase ini isi kebijakan diuji dalam praktik administratif maupun sosial. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012), implementasi dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam kebijakan. Proses implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sumber daya, dan kemampuan pelaksana. Lester dan Stewart (dalam Subarsono, 2022) menambahkan bahwa implementasi yang efektif menuntut keterpaduan antara substansi kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, serta dukungan dari kelompok sasaran.

Untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan, model Edward III (1980) banyak digunakan karena menawarkan kerangka yang komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Edward mengidentifikasi empat variabel penting yang saling berkaitan, yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi menentukan sejauh mana tujuan dan substansi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana. Edward menegaskan bahwa komunikasi yang baik mencakup kejelasan pesan, transmisi yang efektif, dan konsistensi arah antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat, maka interpretasi yang berbeda dapat menimbulkan distorsi kebijakan. Dalam konteks organisasi pemerintah, komunikasi vertikal dan horizontal yang terbuka menjadi kunci koordinasi antar-bidang agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.

Sumber daya merupakan unsur kedua yang menentukan keberhasilan implementasi. Sumber daya meliputi kemampuan manusia, anggaran, peralatan, serta informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, tujuan kebijakan sulit diwujudkan secara optimal. Edward III menekankan bahwa sumber daya yang cukup tidak hanya berarti ketersediaan jumlah, tetapi juga kompetensi, keahlian, dan kejelasan pembagian peran. Dalam konteks birokrasi daerah, keterbatasan pegawai fungsional dan dukungan anggaran sering kali menjadi kendala yang berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, disposisi atau sikap pelaksana

menggambarkan sejauh mana individu atau kelompok yang terlibat memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi mencakup orientasi, motivasi, dan tanggung jawab pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Sikap yang positif dan rasa memiliki terhadap program akan memperlancar implementasi, sedangkan sikap negatif, resistensi, atau ketidaksungguhan dapat menjadi hambatan serius. Edward menilai bahwa disposisi sering kali dipengaruhi oleh insentif, kepemimpinan, dan mekanisme pengawasan di lingkungan organisasi. Faktor terakhir yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi, yang mencakup sistem organisasi, prosedur, serta mekanisme koordinasi. Struktur birokrasi yang terlalu rumit dan memiliki prosedur panjang sering kali menghambat proses pengambilan keputusan dan menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, struktur yang tertata dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dapat meningkatkan kontrol serta mempermudah koordinasi. Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang rinci dan dijalankan secara konsisten menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Keempat variabel dalam model Edward III saling berinteraksi dan tidak dapat berdiri sendiri. Komunikasi yang jelas tanpa didukung sumber daya yang cukup akan menghasilkan kebijakan yang tidak berjalan, demikian pula sumber daya yang besar tanpa disposisi pelaksana yang baik akan berujung pada inefisiensi. Karena itu, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh keseimbangan keempat unsur tersebut dalam konteks organisasi dan lingkungan kebijakan.

Dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia, model Edward III relevan untuk digunakan sebagai alat analisis karena implementasi kebijakan ini melibatkan banyak aktor, koordinasi lintas instansi, serta keterpaduan sistem teknologi informasi dan data. Kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menuntut tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan kebijakan ini melalui pembentukan portal data daerah dan mekanisme tata kelola data yang transparan. Konsep data governance menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tata kelola data mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan dibagikan secara sistematis sehingga memiliki nilai guna bagi pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka kebijakan Satu Data, keberhasilan penerapan data governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan, sumber daya dan komitmen organisasi dalam menjaga konsistensi serta akurasi data.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data di daerah. Penelitian oleh Satria (2021) mengenai implementasi kebijakan Satu Data di Kota Palembang menemukan bahwa koordinasi antar-perangkat daerah masih lemah, terutama dalam penyelarasan metadata dan pembaruan dataset. Studi oleh Rahmatullah (2022) di Provinsi Bangka Belitung mengidentifikasi keterbatasan SDM statistik dan infrastruktur sebagai penghambat utama integrasi data. Penelitian lain oleh Ramadhani (2023) di Kabupaten Tangerang menyoroti rendahnya komitmen pelaksana dan belum optimalnya dukungan anggaran dalam menjalankan portal data daerah. Sementara itu, studi oleh Safitri (2022) di Kota Padang menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tumpang-tindih antar-bidang turut memperlambat proses verifikasi data.

Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan Satu Data masih menghadapi kendala di hampir seluruh aspek yang dijelaskan dalam model Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan ini sekaligus memberikan dasar empiris bahwa penelitian mengenai implementasi Portal Satu Data di Kabupaten Sekadau memiliki relevansi akademik dan praktis yang tinggi, terutama untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan di tingkat daerah. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, penelitian ini menggunakan model Edward III sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau. Keempat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dianggap berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Melalui kerangka ini, analisis diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana interaksi antar-faktor tersebut menentukan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Portal Satu Data di Kabupaten Sekadau.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Portal Satu Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelusuri fenomena sosial dan kebijakan dalam konteks alami, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman utuh dari sudut pandang para pelaku kebijakan. Penelitian dilaksanakan di lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau, yang merupakan instansi utama dalam pelaksanaan kebijakan satu data di tingkat daerah. Lokasi ini dipilih karena dapat memberikan akses langsung kepada aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Penelitian ini

dilakukan dalam rentang waktu Januari 2024 hingga Mei 2025, yang mencakup kegiatan persiapan, pengumpulan data lapangan, serta analisis dan penyusunan hasil penelitian. Subjek penelitian terdiri atas informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu mereka yang dinilai memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan satu data. Informan tersebut meliputi Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral, pejabat fungsional statistisi, serta pengelola data dari bidang statistik sektoral dan bidang aplikasi dan teknologi informasi. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas ASN dan pejabat fungsional dalam pengelolaan data sektoral, mulai dari proses pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi data di portal resmi pemerintah daerah. Wawancara mendalam dilaksanakan secara semi-terstruktur terhadap informan terpilih untuk menggali pengalaman, pandangan, dan makna yang mereka berikan terhadap proses implementasi kebijakan. Sementara itu, dokumentasi difokuskan pada pengumpulan berbagai dokumen resmi dan pendukung, seperti regulasi, laporan internal, struktur organisasi, serta konten dari portal data (<https://data.sekadaukab.go.id>). Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara untuk menjaga fokus dan konsistensi. Selain itu, perekam suara dan alat dokumentasi visual digunakan untuk mendukung akurasi data yang diperoleh.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana informasi disusun dalam bentuk narasi serta matriks tematik untuk mempermudah proses identifikasi pola. Selanjutnya, kesimpulan diperoleh secara induktif melalui proses perbandingan dan verifikasi antar berbagai sumber data guna memastikan konsistensi temuan. Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang berasal dari berbagai informan dan dokumen, sedangkan triangulasi teknik melibatkan perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan objektif mengenai pelaksanaan kebijakan satu data di Kabupaten Sekadau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sekadau, diketahui bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Portal Satu Data Sekadau belum berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa kendala utama yang ditemukan, yang mencakup tiga aspek penting, yaitu proses penyampaian informasi, kejelasan pesan kebijakan, serta konsistensi dalam pemberian arahan teknis di lapangan.

Dari aspek transmisi, komunikasi antara Walidata dan pelaksana teknis masih banyak mengandalkan media informal seperti grup WhatsApp atau instruksi lisan. Seorang kepala bidang menyampaikan bahwa koordinasi terkait pengelolaan data—terutama mengenai proses input dan pembaruan data di portal—biasanya dilakukan melalui pesan singkat atau arahan langsung, karena rapat koordinasi dan pelatihan formal belum terlaksana secara rutin. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan dukungan anggaran. Akibatnya, muncul perbedaan pemahaman teknis antaroperator, khususnya mengenai format input dan penggunaan standar metadata.

Dari sisi kejelasan informasi, sebagian pelaksana teknis di unit kerja mengaku belum memahami secara utuh isi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 49 Tahun 2019 tentang Satu Data Daerah. Banyak operator data yang belum memahami peran mereka sebagai produsen data, termasuk mekanisme penyampaian data dan kriteria kelayakan dataset untuk publikasi. Salah satu staf bidang aplikasi informatika menyebutkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan formal mengenai penyusunan metadata maupun verifikasi kualitas data sebelum diunggah ke portal. Kondisi ini menandakan bahwa sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.

Sementara itu, pada aspek konsistensi informasi, ditemukan ketidaksamaan format permintaan data antarperiode pelaporan. Beberapa operator menyebutkan bahwa arahan dari Walidata kerap

berubah, baik dalam format laporan maupun tenggat waktu pengunggahan data. Hasil observasi juga menunjukkan belum adanya dokumen pedoman teknis yang baku. Ketiadaan panduan tertulis ini menyebabkan pelaksana sering menafsirkan sendiri arahan kebijakan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara Walidata dan pelaksana belum berlangsung efektif. Keterbatasan forum resmi, minimnya dokumentasi tertulis, serta perbedaan persepsi di lapangan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan Portal Satu Data Sekadau.

### **Faktor Sumber Daya**

Analisis lapangan menunjukkan bahwa sumber daya, baik manusia maupun anggaran, merupakan faktor yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau.

Sumber Daya Manusia, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa ketersediaan tenaga fungsional statistisi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sekadau masih sangat terbatas. Dari total 19 ASN yang tersebar di tiga bidang dan sekretariat, hanya satu ASN yang berstatus fungsional statistisi dan satu tenaga honorer yang membantu dalam pengelolaan data statistik sektoral. Kedua personel ini menangani keseluruhan proses mulai dari pengumpulan, verifikasi, validasi, hingga publikasi dataset pada Portal Satu Data Sekadau.

Pada tingkat bidang, pengelolaan data sering kali bukan menjadi tugas utama, melainkan tambahan dari jabatan fungsional lain. Hal ini menyebabkan aktivitas pengumpulan dan penyajian data bersifat sekunder dan tidak menjadi prioritas. Wawancara dengan pengelola data di Bidang Aplikasi dan Informatika menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai dalam proses pengelolaan data dilakukan secara insidental dan bergantung pada permintaan dari Bidang Statistik.

Bukti dokumenter memperkuat kondisi tersebut. Surat rekomendasi pembentukan formasi jabatan fungsional statistisi yang dikeluarkan oleh instansi pembina pada 23 Oktober 2023 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hingga tahun 2024, belum ada penambahan formasi tenaga statistisi dalam rencana kebutuhan ASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, menjadi kendala mendasar yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau.

Selain keterbatasan SDM, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara anggaran yang diusulkan dan yang direalisasikan untuk program statistik sektoral. Berdasarkan data rencana kegiatan Diskominfo, pada tahun 2024 diusulkan dana sebesar Rp186.769.217, namun hanya disetujui Rp111.099.435, atau sekitar 59,5% dari kebutuhan. Pada tahun 2025, kebutuhan meningkat menjadi Rp205.446.139, sementara alokasi yang disediakan hanya Rp112.718.390.

Wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo mengonfirmasi bahwa dukungan anggaran masih jauh dari memadai untuk mendukung pekerjaan pengelolaan data yang bersifat sistematis dan lintas sektor. Keterbatasan dana menghambat pelaksanaan pelatihan, forum koordinasi lintas OPD, serta kegiatan pengembangan metadata. Walaupun infrastruktur seperti server telah diakomodasi melalui Pusat Data Nasional (PDN), kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan sistem, pembinaan, dan pelatihan SDM tetap menjadi tanggung jawab daerah. Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa faktor sumber daya, baik manusia maupun finansial berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan verifikasi, validasi, dan publikasi data sektoral yang menjadi inti dari operasional Portal Satu Data Sekadau.

### **Faktor Disposisi**

Disposisi pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena mencerminkan sikap, komitmen, dan persepsi terhadap kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sekadau, diperoleh temuan bahwa secara umum pelaksana menunjukkan sikap positif, komitmen tinggi, dan persepsi yang konstruktif terhadap kebijakan Portal Satu Data.

Dari aspek sikap pelaksana, baik Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral menilai kebijakan Satu Data sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, terintegrasi, dan berbasis data. Mereka memandang implementasi kebijakan ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan perubahan budaya kerja birokrasi menuju keterbukaan informasi. Pandangan ini juga tercermin di tingkat pelaksana teknis. Para fungsional statistisi dan pengelola data menyatakan bahwa kebijakan Portal Satu Data memberikan arah kerja yang lebih jelas dan membantu menstandarkan format data antarunit, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan SDM.

Dari aspek komitmen, pimpinan Diskominfo menunjukkan keseriusan dalam menjalankan kebijakan melalui pembentukan tim Walidata, fasilitasi pelatihan internal, pendampingan kepada OPD produsen data, serta penguatan kapasitas SDM pengelola data. Kepala bidang dan pelaksana teknis juga memperlihatkan komitmen serupa melalui keterlibatan aktif dalam pengumpulan, verifikasi, dan penyesuaian format data, meski pengelolaan data bukan merupakan tugas utama mereka. Komitmen tersebut bahkan terlihat pada inisiatif pribadi pelaksana dalam membantu rekan kerja memahami metadata dan menjaga kualitas publikasi data.

Adapun dari aspek persepsi pelaksana, baik pimpinan maupun staf teknis menilai kebijakan Portal Satu Data sebagai instrumen penting untuk mengatasi fragmentasi data antarinstansi dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti. Para pelaksana memahami bahwa integrasi data merupakan kebutuhan mendesak untuk reformasi birokrasi. Namun, mereka juga mengakui tantangan implementasi seperti minimnya tenaga ahli statistik, keterbatasan anggaran, dan masih rendahnya pemahaman sebagian staf terhadap standar metadata dan format data. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana—melalui sikap positif, komitmen kelembagaan, dan persepsi konstruktif—menjadi modal penting dalam mendukung implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau, meskipun belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan sumber daya dan struktur birokrasi yang memadai.

### **Faktor Birokrasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor birokrasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau. Faktor ini terutama terlihat pada tiga aspek utama, yaitu struktur organisasi, standar operasional prosedur (SOP), dan koordinasi antarunit kerja. Ketiganya berperan penting dalam menentukan kelancaran alur kerja, pembagian tanggung jawab, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan satu data di tingkat daerah.

#### **a) Struktur Organisasi**

Secara kelembagaan, Dinas Kominfo Kabupaten Sekadau memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang, yakni Bidang Persandian dan Statistik Sektoral, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, serta Sekretariat. Struktur ini secara administratif dianggap memadai untuk mendukung fungsi walidata di daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan Portal Satu Data masih menghadapi kendala karena belum adanya pembagian peran yang proporsional antarbidang.

Penelitian menemukan bahwa pengelolaan data, termasuk proses verifikasi dan validasi, masih sangat terpusat pada Bidang Persandian dan Statistik Sektoral. Bidang ini menanggung beban kerja teknis yang besar, sementara bidang lain yang berperan sebagai produsen data belum memiliki tenaga khusus yang menangani pengelolaan data sektoral. Sebagian staf di bidang lain menjalankan tugas pengumpulan data sebagai pekerjaan tambahan, bukan fungsi utama. Kondisi ini berdampak pada rendahnya koordinasi dan keterlambatan publikasi data ke portal. Selain itu, jabatan fungsional statistisi belum ditempatkan secara strategis untuk mendukung fungsi analisis dan penyusunan metadata yang lebih sistematis. Dengan demikian, secara fungsional, struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan Portal Satu Data secara efektif.

#### **b) Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo Sekadau telah menyusun beberapa SOP terkait pengelolaan data, seperti SOP permintaan data statistik sektoral, SOP kompilasi produk administrasi data, SOP survei data, dan SOP publikasi data ke Portal Satu Data Sekadau. Keberadaan SOP ini juga diperkuat dengan dasar hukum berupa Peraturan Bupati Sekadau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sekadau. Secara dokumen, perangkat prosedural tersebut telah memberikan landasan formal bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data sektoral di daerah.

Namun, implementasi SOP di lapangan belum berjalan optimal. Beberapa bidang belum memiliki SOP spesifik, dan pelaksanaan prosedur masih sangat bergantung pada inisiatif individu maupun koordinasi informal antarpegawai. Sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai penggunaan SOP belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga sebagian pegawai belum memahami alur kerja, mekanisme verifikasi, serta tanggung jawab antarunit secara utuh. Akibatnya, penerapan SOP tidak seragam di seluruh bidang dan seringkali baru digunakan ketika ada permintaan data atau kegiatan khusus. Kondisi ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kualitas dan format data yang dipublikasikan, serta memperlambat proses pembaruan data sektoral di portal.

#### **c) Koordinasi Antarunit**

Koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan kebijakan Portal Satu Data Sekadau masih tergolong lemah dan belum terlembaga secara formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi lintas bidang umumnya dilakukan secara informal melalui percakapan langsung atau grup komunikasi digital, seperti WhatsApp. Rapat koordinasi formal lintas bidang hanya dilakukan satu kali dalam setahun, dan belum ada jadwal rutin untuk mengevaluasi progres pengumpulan serta validasi data. Meskipun hubungan personal antarpegawai cukup baik, minimnya mekanisme koordinasi resmi membuat kesamaan persepsi dan pemahaman teknis sering kali tidak tercapai.

Ketiadaan forum koordinasi yang terjadwal menyebabkan munculnya beberapa permasalahan seperti keterlambatan pengiriman data, ketidaksesuaian format antarbidang, dan lemahnya kontrol terhadap standar indikator data sektoral. Di sisi lain, belum adanya tim lintas bidang khusus yang menangani integrasi dan sinkronisasi data mengakibatkan pekerjaan pengelolaan data cenderung bersifat parsial. Kondisi ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan Portal Satu Data, karena setiap bidang cenderung bekerja sendiri-sendiri tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Dengan demikian, meskipun semangat kolaboratif antarpegawai cukup tinggi, lemahnya struktur koordinasi formal menjadi kendala utama dalam menjaga konsistensi, keterpaduan, dan kualitas data yang dihasilkan.

## **Pembahasan**

### **Faktor Komunikasi**

Temuan penelitian tersebut memperkuat pandangan George C. Edward III bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana komunikasi berlangsung secara jelas, konsisten, dan mampu menjangkau seluruh pelaksana. Komunikasi yang tidak terstruktur menimbulkan distorsi informasi dan interpretasi ganda di lapangan.

Pada aspek transmisi informasi, komunikasi yang hanya mengandalkan media informal seperti WhatsApp dan instruksi lisan belum mampu menjamin keseragaman pemahaman teknis. Menurut Edward III, transmisi informasi yang baik seharusnya dilakukan melalui mekanisme formal, terjadwal, dan terdokumentasi. Kondisi di Sekadau menunjukkan lemahnya pola komunikasi formal karena minimnya forum koordinasi resmi, seperti rapat atau focus group discussion (FGD). Hasil ini sejalan dengan temuan Sena Putra Prabujaya et al. (2023), yang menyatakan bahwa penyaluran informasi dalam kebijakan satu data perlu diperbanyak melalui forum resmi agar komunikasi menjadi transparan dan tidak bias. Dengan demikian, peningkatan intensitas rapat koordinasi dan pelatihan teknis menjadi langkah strategis untuk memperkuat transmisi informasi yang seragam.

Dari aspek kejelasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan masih terbatas di kalangan pelaksana teknis. Edward III menegaskan bahwa kejelasan informasi merupakan syarat mutlak bagi efektivitas implementasi kebijakan. Ketidakjelasan mengenai peran produsen data dan standar metadata di Sekadau menunjukkan bahwa pesan kebijakan belum tersampaikan secara menyeluruh. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Paul Rudolf Sangkop et al. (2023) di Kota Manado, yang menemukan bahwa variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik belum berjalan optimal akibat penyampaian informasi yang tidak jelas dan tidak konsisten.

Kejelasan informasi juga menjadi fokus dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan pentingnya standar dan tujuan kebijakan yang eksplisit. Begitu pula Sabatier dan Mazmanian (1983) yang menegaskan bahwa kejelasan sasaran kebijakan adalah prasyarat utama keberhasilan implementasi. Dalam konteks Sekadau, ketidakjelasan standar dan mekanisme input data menyebabkan interpretasi berbeda di kalangan pelaksana, sehingga proses publikasi data sering tertunda.

Selanjutnya, dari aspek konsistensi informasi, ditemukan bahwa perubahan instruksi atau format pelaporan yang tidak seragam menyebabkan kebingungan pelaksana. Matland (1995) menilai bahwa konsistensi dalam arahan kebijakan penting untuk meminimalkan ambiguitas, sedangkan O'Toole (2000) menegaskan bahwa instruksi yang stabil membantu pelaksana bekerja dengan lebih efisien tanpa harus menafsirkan ulang arahan. Dalam konteks ini, ketidakkonsistenan komunikasi di Dinas Kominfo Sekadau menunjukkan perlunya penyusunan dokumen pedoman teknis yang terstandar dan mudah diakses seluruh pelaksana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau sangat bergantung pada tiga elemen utama komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Edward III: transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Pola komunikasi informal tanpa dukungan dokumentasi tertulis telah menciptakan perbedaan persepsi dan menghambat koordinasi lintas bidang. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme komunikasi formal yang terstruktur dan terdokumentasi

melalui forum koordinasi, pedoman teknis, serta sosialisasi rutin agar seluruh pelaksana memiliki acuan dan pemahaman yang sama terhadap kebijakan Portal Satu Data Sekadau.

### **Faktor Sumber Daya**

Hasil penelitian ini mendukung pandangan Edward III (1980) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks kebijakan Portal Satu Data di Kabupaten Sekadau, jumlah tenaga pengelola data yang terbatas mengakibatkan beban kerja menjadi tidak seimbang serta memperlambat proses validasi data. Situasi tersebut sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa kekurangan sumber daya manusia dapat menimbulkan hambatan atau bottleneck pada setiap tahap pelaksanaan kebijakan.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan Mazmanian dan Sabatier (1980) yang menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya administratif yang memadai, termasuk personel penuh waktu dengan keahlian yang relevan, merupakan prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam kasus Sekadau, keterbatasan jumlah tenaga fungsional statistisi menyebabkan proses pengumpulan dan validasi data tidak dapat berjalan optimal.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Nuryana et al. (2025) di Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan bahwa kekurangan tenaga ahli statistik dan terbatasnya pelatihan SDM menghambat pelaksanaan kebijakan Satu Data. Penelitian Samsul Ode et al. (2022) tentang Jakarta Open Data juga menemukan bahwa penempatan tugas pengelolaan data sebagai tanggung jawab tambahan membuat kegiatan unggah dan validasi data tidak berkelanjutan.

Dalam konteks Sekadau, fakta bahwa pengelolaan data tidak menjadi tugas utama menunjukkan rendahnya prioritas kelembagaan terhadap fungsi statistik. Hal ini berimplikasi pada kurangnya perhatian terhadap peningkatan kapasitas pelaksana, lemahnya koordinasi antar-bidang, dan rendahnya kualitas publikasi data. Sebagaimana dijelaskan Creswell (2014), proses validasi memerlukan tenaga ahli yang memahami prosedur pengujian data secara reliabel dan konsisten. Dengan demikian, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga fungsional statistisi menjadi langkah penting untuk menjamin kredibilitas data dan kontinuitas publikasi portal.

Ketersediaan sumber daya anggaran juga memainkan peran fundamental dalam mendukung implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menempatkan anggaran sebagai salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, kegiatan pendukung seperti pelatihan, koordinasi lintas unit, dan penyusunan metadata tidak dapat berjalan dengan efektif. Mazmanian dan Sabatier (1983) menambahkan bahwa sumber daya keuangan merupakan salah satu dari tiga kondisi utama keberhasilan implementasi kebijakan publik, bersama sifat masalah dan konteks politik eksternal.

Hasil penelitian di Sekadau menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang hanya mencapai sekitar 59,5% dari kebutuhan menyebabkan sejumlah kegiatan prioritas tidak terlaksana optimal. Fenomena ini konsisten dengan penelitian Samsul Ode et al. (2022) dan Nuryana et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan anggaran merupakan hambatan umum dalam pengelolaan portal data daerah.

Walaupun dukungan Pusat Data Nasional membantu menekan beban infrastruktur, keterbatasan dana daerah tetap berdampak pada rendahnya intensitas pembinaan SDM, minimnya forum koordinasi, serta menurunnya motivasi pelaksana. Laporan evaluasi statistik sektoral tahun 2023 juga menunjukkan nilai kinerja kelembagaan yang masih rendah (rata-rata di bawah 1,8), mencerminkan lemahnya aspek perencanaan dan penyebarluasan data.

#### **Integrasi Pembahasan**

Secara keseluruhan, faktor sumber daya manusia dan anggaran memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM memperlambat kinerja, sementara keterbatasan anggaran memperburuk situasi melalui minimnya pelatihan dan pembinaan. Dalam kerangka Edward III (1980), kondisi ini menggambarkan bahwa faktor sumber daya menjadi fondasi yang menopang variabel lain seperti komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Satu Data di Sekadau, diperlukan strategi penguatan sumber daya yang berkelanjutan, meliputi: (1) penambahan formasi jabatan fungsional statistisi di setiap unit produsen data; (2) peningkatan alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas; serta (3) pembentukan mekanisme koordinasi lintas bidang yang terstruktur dan terukur. Upaya tersebut tidak hanya akan memperbaiki kinerja portal data daerah,

tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **Faktor Disposisi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana di Sekadau berada pada kategori mendukung dan proaktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward III (1980) yang menegaskan bahwa disposisi pelaksana, termasuk sikap dan niat individu, merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Sikap yang positif mencerminkan adanya penerimaan terhadap nilai dan tujuan kebijakan, yang menurut Van Meter dan Van Horn (1975) berperan penting dalam menjembatani antara desain kebijakan dan praktik di lapangan.

Meskipun pelaksana menunjukkan pemahaman mendalam terhadap makna strategis kebijakan, kenyataannya hasil implementasi belum sepenuhnya optimal. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara disposisi positif dan hasil nyata di lapangan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan koordinasi antarunit, kekurangan tenaga ahli, dan keterbatasan dukungan anggaran. Sejalan dengan penelitian Nur Khasanah et al. (2018) tentang Program Keluarga Harapan, disposisi pelaksana yang baik tidak selalu menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang cukup. Dalam konteks Sekadau, sikap dan komitmen pelaksana menjadi fondasi moral yang kuat, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural yang bersifat sistemik.

Kepala Dinas dan Kepala Bidang menunjukkan bentuk komitmen yang konkret melalui pembentukan tim Walidata, pendampingan teknis, dan peningkatan kapasitas SDM. Di tingkat pelaksana teknis, komitmen tampak dari dedikasi dan kesadaran profesional terhadap pentingnya data yang valid dan akuntabel. Menurut Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan telah diinternalisasi oleh pelaksana, di mana mereka bekerja bukan hanya karena instruksi, tetapi karena keyakinan terhadap nilai kebijakan itu sendiri. Namun, sebagaimana ditekankan Edward, komitmen pelaksana hanya akan efektif bila ditunjang oleh komunikasi yang jelas, sumber daya yang mencukupi, dan struktur birokrasi yang mendukung.

Dari sisi persepsi, para pelaksana di Sekadau memiliki pandangan yang relatif seragam bahwa kebijakan Portal Satu Data merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Hal ini sesuai dengan variabel "karakteristik agen pelaksana" dalam model Van Meter dan Van Horn (1975), yang menempatkan pemahaman dan persepsi pelaksana sebagai penentu utama efektivitas kebijakan. Kepala Dinas dan Kepala Bidang melihat kebijakan ini sebagai solusi untuk mengatasi ketidakterpaduan data, sedangkan pelaksana teknis menilai kebijakan ini mampu memberi arah dan standar kerja yang lebih jelas.

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan adanya implementation gap antara persepsi positif dan kondisi riil pelaksanaan. Hambatan utama berupa keterbatasan pelatihan, ketidakterpaduan format data, dan kurangnya pemahaman metadata membuat pelaksanaan kebijakan berjalan lambat. Pandangan Lipsky (1980) tentang street-level bureaucracy dapat menjelaskan fenomena ini: pelaksana lapangan memiliki ruang diskresi yang luas, sehingga persepsi mereka sangat memengaruhi cara kebijakan diadaptasi dalam praktik. Dalam konteks Sekadau, persepsi positif menjadi modal awal, tetapi masih perlu diimbangi dengan dukungan kelembagaan dan mekanisme umpan balik agar semangat tersebut dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang sistematis.

Secara teoritik, hasil penelitian ini memperkuat model Edward III (1980) bahwa faktor disposisi tidak dapat bekerja secara terpisah dari komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Sikap, komitmen, dan persepsi positif di Sekadau menunjukkan kesiapan pelaksana secara moral dan kognitif, namun keterbatasan struktural dan sumber daya membuat implementasi belum mencapai hasil optimal.

Secara praktis, disposisi positif ini menjadi modal institusional yang berharga bagi pemerintah daerah. Dengan memperkuat dukungan anggaran, menyediakan pelatihan statistik dan manajemen data, serta memperjelas mekanisme koordinasi lintas bidang, potensi disposisi pelaksana dapat dioptimalkan menjadi kinerja nyata dalam penyelenggaraan Portal Satu Data. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada peraturan dan struktur formal, tetapi juga pada kualitas sikap dan komitmen pelaksana yang diimbangi oleh dukungan sistemik dan sumber daya yang memadai.

### **Faktor Birokrasi**

Faktor birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam konteks kebijakan digital seperti Portal Satu Data Sekadau. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan birokrasi yang ditemukan berkaitan erat dengan tiga elemen utama sebagaimana

dirumuskan oleh George C. Edwards III, yaitu struktur organisasi, standar operasional prosedur (SOP), dan koordinasi. Ketiga elemen ini membentuk kerangka kerja yang menentukan seberapa efektif kebijakan dapat diterjemahkan dari keputusan normatif menjadi tindakan operasional di lapangan.

a) Struktur Organisasi dan Distribusi Kewenangan

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III menempatkan struktur birokrasi sebagai salah satu variabel kunci yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi menentukan jalur komunikasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengawasan dalam organisasi pelaksana. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Portal Satu Data masih bersifat terpusat pada satu bidang, yaitu Bidang Persandian dan Statistik Sektoral. Sentralisasi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja dan memperlambat proses validasi data lintas bidang.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa karakteristik organisasi pelaksana, termasuk pola pembagian tugas dan kewenangan, akan memengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan. Ketika pembagian fungsi tidak proporsional, proses implementasi menjadi tidak efisien karena keputusan teknis bergantung pada satu unit kerja. Hal tersebut juga memperkuat teori Mazmanian dan Sabatier yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menstrukturkan proses dan menyalurkan sumber daya secara tepat kepada pelaksana di lapangan.

Dalam kasus Portal Satu Data Sekadau, struktur birokrasi yang masih hierarkis menimbulkan bottleneck pada alur pengambilan keputusan. Ketiadaan desentralisasi dalam pengelolaan data menyebabkan terbatasnya ruang inovasi di bidang lain yang juga berperan sebagai produsen data. Oleh karena itu, penataan ulang struktur organisasi menjadi penting untuk menciptakan sistem kerja yang lebih kolaboratif dan mempercepat proses penyajian data publik.

b) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Konsistensi Implementasi

Keberadaan SOP menjadi instrumen penting dalam mengatur rutinitas birokrasi agar berjalan sesuai standar dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan kebijakan. Edwards III memandang SOP sebagai bagian dari mekanisme struktural yang membantu birokrasi menghadapi kompleksitas dan keterbatasan sumber daya. Namun, ia juga menekankan bahwa SOP yang terlalu kaku dapat menjadi penghambat adaptasi terhadap perubahan konteks kebijakan.

Penelitian di Sekadau menunjukkan bahwa meskipun sejumlah SOP telah disusun, penerapannya masih belum merata di seluruh bidang. Sosialisasi dan pelatihan teknis yang terbatas membuat sebagian pegawai belum memahami secara utuh alur dan tanggung jawab prosedural. Akibatnya, implementasi SOP sering kali bergantung pada inisiatif personal, bukan mekanisme kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan praktik operasional.

Kesenjangan tersebut dapat dijelaskan dengan kerangka Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Ketika standar tidak tersosialisasi dengan baik, pelaksana akan menafsirkan kebijakan secara beragam, sehingga efektivitas implementasi menurun. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky, semakin panjang rantai birokrasi dan semakin banyak titik keputusan tanpa panduan operasional yang jelas, maka semakin besar pula peluang terjadinya deviasi dari tujuan kebijakan.

Dalam konteks ini, Dinas Kominfo Sekadau perlu memperkuat fungsi SOP tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi yang terus diperbarui sesuai dengan dinamika pengelolaan data. Penerapan pelatihan teknis dan forum evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana memahami, menginternalisasi, dan menerapkan prosedur secara konsisten.

c) Koordinasi dan Keterpaduan Lintas Unit

Koordinasi antarunit birokrasi merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas kebijakan publik. Edwards III menegaskan bahwa tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, komunikasi antaraktor kebijakan akan melemah, menyebabkan kesalahpahaman tujuan, dan menimbulkan fragmentasi dalam pelaksanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam implementasi Portal Satu Data Sekadau sebagian besar masih bersifat informal dan insidental. Meskipun komunikasi personal antarpegawai berjalan baik, ketiadaan forum koordinasi formal yang terjadwal membuat tidak ada ruang untuk menyamakan persepsi teknis dan mengevaluasi capaian secara berkala. Hal ini memperlemah integrasi antarbidang serta menyebabkan inkonsistensi format dan waktu publikasi data.

Pendekatan Pressman dan Wildavsky membantu menjelaskan fenomena ini melalui konsep *organizational links*, yaitu hubungan antarunit yang harus dijaga agar proses implementasi tidak terfragmentasi. Dalam kasus Sekadau, semakin sedikit mekanisme koordinatif yang formal, semakin

besar potensi hambatan dalam sinkronisasi data dan pencapaian target kebijakan. Kondisi ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lemahnya forum koordinatif dapat menurunkan efektivitas implementasi, bahkan ketika instrumen formal sudah tersedia. Untuk memperkuat koordinasi, diperlukan pembentukan tim lintas bidang yang bekerja secara terjadwal dalam forum evaluasi rutin. Pendekatan ini tidak hanya akan mempercepat penyelesaian masalah teknis, tetapi juga memperkuat komitmen kolektif antaraktor birokrasi dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel.

Jika ditinjau secara konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi dalam model Edwards III saling terkait dengan variabel komunikasi dan sumber daya. Ketika struktur organisasi terlalu terpusat, SOP tidak diterapkan secara konsisten, dan koordinasi tidak terlembaga, maka komunikasi antarunit melemah dan efektivitas sumber daya manusia menurun. Situasi ini mencerminkan kompleksitas implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan dalam teori top-down Mazmanian dan Sabatier, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan desain kebijakan serta kapasitas institusional pelaksana.

Dengan demikian, birokrasi yang responsif dan adaptif menjadi kunci dalam memastikan efektivitas Portal Satu Data Sekadau. Pembentukan struktur organisasi, penyempurnaan SOP, serta penguatan mekanisme koordinasi akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja kebijakan secara menyeluruh. Reformasi birokrasi semacam ini diperlukan agar prinsip keterbukaan informasi dan interoperabilitas data sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia dapat terwujud di tingkat daerah secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Portal Satu Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau belum berjalan secara optimal. Mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III, ditemukan sejumlah hambatan pada empat variabel utama:

1. Komunikasi belum dilaksanakan secara formal dan sistematis. Dominasi komunikasi informal melalui media seperti WhatsApp dan arahan lisan berdampak pada terjadinya miskomunikasi dan ketidaksamaan pemahaman teknis antar pelaksana kebijakan, terutama dalam proses input data dan penyusunan metadata.
2. Sumber daya manusia dan anggaran masih sangat terbatas. Jumlah dan kompetensi tenaga fungsional, khususnya statistisi, tidak mencukupi. Pengelolaan data sektoral masih dijalankan oleh pegawai yang merangkap tugas lain, sedangkan alokasi anggaran belum memadai untuk mendukung kegiatan teknis seperti pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan sistem.
3. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap dan komitmen yang positif terhadap kebijakan. Namun, semangat tersebut belum ditunjang oleh dukungan kelembagaan dan sistem kerja yang efektif, sehingga belum mampu menghasilkan kinerja implementasi yang optimal.
4. Struktur birokrasi belum mampu mengakomodasi kompleksitas teknis pengelolaan data. Kegiatan pengumpulan, validasi, dan publikasi data masih terpusat pada satu bidang, tanpa dukungan tim lintas unit yang terintegrasi. Meskipun SOP telah tersedia, implementasinya belum konsisten akibat minimnya pelatihan dan koordinasi formal.

Secara umum, keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh komitmen para pelaksana, tetapi juga bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta struktur organisasi yang mendukung tata kelola data secara inklusif dan berkelanjutan.

### Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Portal Satu Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

1. Penguatan komunikasi formal dan teknis antarunit kerja, melalui rapat koordinasi rutin, pelatihan teknis, serta forum diskusi tematik. Hal ini penting untuk menyamakan pemahaman terhadap standar metadata dan prinsip interoperabilitas.

2. Penambahan dan pemerataan jabatan fungsional statistisi dan pengelola data di seluruh bidang teknis. Penempatan personel yang kompeten akan mendukung proses pengumpulan, validasi, dan publikasi data yang lebih merata dan berkelanjutan.
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan statistik sektoral, yang diarahkan secara khusus dan terpisah dari anggaran operasional umum. Alokasi ini perlu difokuskan pada pelatihan, pengembangan sistem informasi, serta penguatan kelembagaan data.
4. Pembentukan tim teknis lintas bidang yang bersifat kolegial dan inklusif. Tim ini bertugas melakukan koordinasi pengelolaan data, validasi lintas unit, dan menyusun laporan kinerja data tahunan, sehingga menciptakan mekanisme kerja yang terintegrasi.
5. Optimalisasi implementasi SOP melalui sosialisasi menyeluruh dan pelatihan berkelanjutan. Pemahaman yang merata terhadap prosedur operasional akan meningkatkan konsistensi pelaksanaan dan kualitas data lintas sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG (2022). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Manajemen, dan Strategi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. (2012) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta
- Ladley, john (2012), *Data Governance: How to Design, Deploy, and Sustain an Effective Data Governance Program*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Tampubolon, Manahan P. (2020). *Change Management*. Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Berners-Lee, T. (1999). *Weaving the web: The original design and ultimate destiny of the World Wide Web*. Harper San Francisco.
- Adistyarini, H., & Apriono, C. (2024). *Using the Eisenhower Matrix to identify open government data parameter toward information disclosure in Indonesia*. BPOSTEL Journal.
- Bernot, A., Tjondronegoro, D., Rifai, B., Hasan, R., Liew, A. W.-C., Verhelst, T., & Tiwari, M. (2024). *Institutional dimensions in open government data: A deep dive into Indonesia's Satu Data initiative and its implications for developing countries*. *Public Performance & Management Review* 47(6), 1399–1429. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>
- Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy learning of One Data Indonesia for supporting data-driven policy. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025>
- Peraturan Presiden 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, (2019).
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Satu Data Kabupaten Sekadau (2019)